

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk membentuk serta saling bertukar informasi, sehingga tercipta pemahaman di antara beberapa pihak yang terlibat. Melalui komunikasi, manusia akan saling terhubung, menyampaikan pesan, mempengaruhi pandangan dan tindakan orang lain, serta berupaya mendorong perubahan sikap dan perilaku. Dalam ranah analisis kebijakan, komunikasi berfungsi sebagai jembatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan masyarakat kepada pihak pemerintah agar dapat direspon melalui kebijakan yang tepat (Satispi, 2022).

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam (Astuti, 2021) komunikasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang berlangsung di dalam lembaga pemerintahan, yang mencakup penyampaian pesan, gagasan, dan program pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari dinamika komunikasi organisasi. Komunikasi kebijakan tidak hanya terbatas pada penyampaian hasil akhir kebijakan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga mencakup proses pengkomunikasian alur kebijakan dari awal sejak tahap perumusan, pengambilan keputusan, hingga implementasi kebijakan.

Permasalahan yang kerap dihadapi lembaga pemerintah umumnya berkaitan dengan hubungan mereka dengan masyarakat sebagai penerima utama kebijakan. Perbedaan dalam pemahaman, serta kondisi sosial, iklim, dan budaya masyarakat

sering kali menimbulkan ketidaksepahaman, yang bahkan dapat memicu penolakan terbuka, seperti aksi demonstrasi terhadap kebijakan yang belum disosialisasikan secara baik kepada masyarakat. Komunikasi dalam kebijakan memiliki peran krusial sebagai tolak ukur keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sebaik apapun rancangan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, jika tanpa penyampaian yang jelas, terbuka, dan efektif kepada masyarakat yang menjadi sasaran, kebijakan tersebut akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Komunikasi kebijakan semakin kompleks seiring dengan kemajuan pesatnya teknologi informasi, yang akan menciptakan tantangan baru dalam menyampaikan pesan kebijakan secara akurat dan dapat diterima publik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya dapat dinilai dari sisi teknokratik semata, melainkan juga harus mempertimbangkan kualitas komunikasinya. Dalam hal ini, peran analis kebijakan menjadi sangat penting, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran serta melakukan advokasi kebijakan melalui strategi komunikasi yang tepat, sehingga proses penyampaian kebijakan kepada publik dapat berlangsung secara efektif dan membangun pemahaman bersama (Astuti, 2021).

Seperti dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang pastinya memerlukan komunikasi kebijakan yang efektif untuk melihat keberhasilan dari implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6%, angka ini menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 24,4%. Presiden Joko Widodo telah menetapkan target penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). Akan

tetapi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya sampai pertengahan tahun 2024, hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan jika prevalensi stunting masih berada di angka 21,5 persen. Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat kecil, yakni hanya 0,1% dibandingkan dengan tahun 2022. Sehingga angka tersebut masih jauh dari target penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 (Tarmizi, 2024).

Tabel 1. 1 Data Stunting di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024



Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki prevalensi balita stunting sebesar 24,4% berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 dan menempati urutan 10 terbesar, angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 27,2% sehingga menempati posisi ke-4 terbesar di Jawa Barat (Fitriani et al., 2024). Akan tetapi, berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023 telah mengalami penurunan mencapai 20,7%. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKBP3A) Kabupaten Tasikmalaya

juga mengharapkan jika pada tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya bisa mencapai 14% (Widayanti, 2024). Namun, setelah dilakukan pra penelitian di Dinas Kesehatan menunjukkan angka stunting pada tahun 2024 masih berada pada angka 17,1%. Jadi masih belum mencapai target prevalensi stunting secara nasional di angka 14%.

Kebijakan yang mengatur terkait pencegahan stunting telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Lahirnya peraturan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya menuntaskan stunting di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu peraturan ini dianggap belum efektif dalam mengakomodasi upaya percepatan penurunan stunting, sehingga perlu diganti. Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini bertujuan untuk menghasilkan daya yang sehat, cerdas, produktif dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui percepatan penurunan stunting. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa upaya untuk mempercepat penurunan angka stunting harus dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya (Putri & Suprayoga, 2024).

Kabupaten Tasikmalaya menetapkan kebijakan terkait stunting yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan mencabut Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang

Penurunan Stunting. Hal ini menunjukan karena adanya pembaharuan dan penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya.

Implementasi kebijakan dari Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 ini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Seperti peran dari dinas lintas sektor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas melaksanakan edukasi dan promosi kesehatan di lingkungan sekolah, terutama pada anak usia dini dan sekolah dasar, serta pelibatan guru dan siswa dalam kampanye pencegahan stunting, menyediakan akses pendidikan kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, termasuk calon pengantin, untuk pencegahan stunting sejak pra-nikah. Dinas Pendidikan turut berkontribusi secara aktif dalam mempercepat penurunan angka stunting, salah satunya melalui penguatan peran Guru di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (Irlana, 2024)



Gambar 1. 1 Sosialisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Guru PAUD mengenai Pencegahan Stunting

Selain itu, Dinas Sosial bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) berperan penting dalam memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang berisiko mengalami stunting melalui berbagai program bantuan sosial, seperti bantuan pangan dan fasilitas sanitasi. Selain itu, Dinsos P2KBP3A juga bertugas melakukan pendataan, menyalurkan bantuan, dan memantau kondisi keluarga penerima manfaat guna memastikan program penurunan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu dengan berperan melalui kegiatan edukasi, pendampingan keluarga, pembinaan kader, serta kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama keberhasilan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya (Fitrian, 2024).

Dinas Pertanian mendukung ketahanan pangan keluarga melalui program penyediaan dan pendampingan kebun gizi, pemanfaatan lahan pekarangan, serta pengembangan pangan lokal bergizi, mendorong inovasi pangan seperti budidaya ikan lele, ternak lele dalam ember, dan pemanfaatan daun kelor untuk meningkatkan asupan gizi keluarga, berkolaborasi dengan masyarakat dan kelompok tani untuk memastikan ketersediaan pangan sehat dan terjangkau bagi keluarga berisiko stunting (AW, 2024).

Dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Dinas kesehatan Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan beberapa program untuk penurunan stunting yang dibagi menjadi dua, yaitu:

- Intervensi Spesifik
 1. Untuk remaja putri:

- a. Skrining anemia.
- b. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri.
- 2. Untuk ibu hamil:
 - a. Pemeriksaan kehamilan (ANC).
 - b. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) ibu hamil.
 - c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).
- 3. Untuk balita:
 - a. Pemantauan pertumbuhan balita.
 - b. ASI eksklusif.
 - c. Pemberian MPASI kaya protein hewani bagi baduta.
 - d. Tata laksana balita dengan masalah gizi (tidak naik berat badannya, berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting).
 - e. Peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi.
- Intervensi sensitif
 - 1. Pelayanan keluarga berencana (KB) pasca persalinan.
 - 2. Kehamilan yang tidak diinginkan.
 - 3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian pelayanan nikah.
 - 4. Keluarga beresiko stunting memperoleh pendampingan.
 - 5. Rumah tangga mendapat akses air minum layak di kab/kota prioritas.
 - 6. Rumah tangga mendapat akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kab/kota prioritas.

7. 10 juta keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat.
8. 15,6 juta keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.

Dari program intervensi spesifik dan intervensi sensitif tersebut terkadang masih terjadi mis-komunikasi yang menyebabkan intervensi spesifik tidak sejalan dengan intervensi sensitifnya. Apalagi di setiap kecamatan terdapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di mana orang yang terlibat bukan hanya dari sektor kesehatan saja, tetapi banyak orang yang terlibat dari pegawai kecamatannya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang biasanya mengelola intervensi sensitifnya yang berhubungan dengan status sosial.

Kondisi tersebut termasuk persoalan komunikasi kebijakan yang di mana menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dan keselarasan dalam penyampaian informasi antarsektor, seperti pesan, tujuan, dan peran masing-masing pihak belum terartikulasi secara jelas dan terstruktur, sehingga akan menghambat efektivitas implementasi kebijakan dalam percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, suatu kebijakan pasti memerlukan komunikasi dan kerjasama yang efektif antar instansi untuk membantu percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Shafira Azahra, Hana Hana, dan Ninuk Arifiyani yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Stunting” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi literatur dari berbagai referensi, seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis strategi komunikasi pemerintah dalam mencegah stunting di Indonesia dengan menekankan empat aspek utama, yaitu:

mengenali sasaran komunikasi (primer, sekunder, dan tersier), pemilihan media komunikasi (tatap muka maupun media massa), pengkajian pesan komunikasi (kampanye publik, advokasi kebijakan, mobilisasi sosial), serta peran komunikator (pemerintah pusat, daerah, hingga posyandu dan PAUD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah berjalan cukup baik dalam menyampaikan pesan pencegahan stunting, meskipun masih diperlukan konsolidasi lintas sektor hingga tingkat desa. Teori yang digunakan mengacu pada pemikiran Effendy tentang strategi komunikasi yang menekankan perencanaan dan manajemen komunikasi, serta diperkuat oleh literatur komunikasi strategis yang relevan dengan konteks kebijakan kesehatan masyarakat. (Shafira Azahra et al., 2023)

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrianti Azhar Firdausi dan Aries yang berjudul *“Communication Strategy for Handling Cases of Stunting and Bad Nutrition Through the 2023 Stunting Free Program (Bessan) in Cipocok District, Serang City”* berfokus untuk menganalisis strategi komunikasi dalam penanganan stunting dan gizi buruk melalui program Bessan 2023 di Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan mencakup mengenali audiens, menetapkan tujuan, menyusun pesan, menentukan metode, serta pemilihan media, yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, DP3AKB, KUA, kader posyandu, dan PKK. Teori yang digunakan merujuk pada konsep strategi komunikasi menurut Abidin dan Anwar, yang menekankan pentingnya perencanaan dan manajemen komunikasi agar pesan dapat efektif mengubah perilaku masyarakat. Penelitian ini

menegaskan bahwa pendampingan berkelanjutan oleh kader posyandu dan organisasi masyarakat merupakan instrumen penting dalam membangun strategi komunikasi yang berkelanjutan untuk menurunkan angka stunting dan gizi buruk. (Azhar Firdausi & Aries, 2024)

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Melani Ellizabeth dan Tsuroyya yang berjudul “Strategi Komunikasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam Penanganan Penurunan Stunting di Kota Surabaya (Studi Kasus pada Wilayah Kelurahan Ujung)”. Penelitian ini berfokus menganalisis strategi komunikasi TPPS dalam menurunkan angka stunting melalui program Kelas Balita Stunting (KELANTING). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi langsung menjadi strategi utama dalam edukasi gizi dan pengasuhan, yang terbukti efektif menurunkan jumlah balita stunting dari 25 anak pada tahun 2023 menjadi 8 anak pada tahun 2025. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan, seperti keterbatasan waktu orang tua, kurangnya pemahaman tentang stunting, kendala bahasa, serta mitos masyarakat terkait faktor keturunan. Teori yang digunakan adalah *Extended Parallel Processing Model* (EPPM) dari Kim Witte, yang menjelaskan bagaimana persepsi ancaman dan efikasi memengaruhi penerimaan pesan kesehatan dan perubahan perilaku. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi tatap muka yang konsisten, adaptif terhadap budaya lokal, dan melibatkan kader serta masyarakat untuk mencapai penurunan stunting secara signifikan. (Ellizabeth, 2025)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rania Putri Alifa dan Maylanny Christin yang berjudul “Analisis Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Upaya

Percepatan Zero Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Program Kampanye Sosial Gerakan Seribu untuk Stunting)” berfokus untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah daerah dalam program kampanye sosial Gerakan Seribu untuk Stunting (GERBUTING) yang dilakukan di Nagari Sungai Naniang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi dijalankan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan digunakan pendekatan partisipatori dengan melibatkan masyarakat, tahap implementasi mencakup sosialisasi, edukasi gizi, parenting class, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sedangkan tahap evaluasi dilakukan melalui monitoring rutin oleh walinagari, Rumah Desa Sehat (RDS), serta review tahunan pemerintah daerah. Teori yang digunakan merujuk pada Effendy tentang strategi komunikasi sebagai perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, serta diperkuat dengan konsep perencanaan komunikasi dari Abidin yang menekankan analisis masalah, khalayak, tujuan, media, pesan, hingga evaluasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan strategi komunikasi percepatan penurunan stunting. (Alifa & Christin, 2023)

Terakhir dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukri Ariansyah dan Fiandy Mauliansyah yang berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya dalam Mensosialisasikan Pencegahan Stunting”. Fokus penelitian ini adalah menganalisis strategi komunikasi Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya melalui program PeKa-ASA (Pembinaan Keluarga Stunting Aceh Barat Daya) dalam mensosialisasikan pencegahan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

strategi komunikasi dijalankan secara sistematis melalui empat tahap, yaitu research, plan, execute, dan evaluate, dengan sasaran utama remaja putri, ibu hamil, serta ibu dengan anak usia dua tahun ke bawah. Strategi ini mencakup sosialisasi langsung, edukasi gizi, serta pemanfaatan media sosial dan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun media lokal. Evaluasi program menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan perilaku gizi, keterlibatan aktif masyarakat, serta penurunan prevalensi stunting. Teori yang digunakan merujuk pada konsep strategi komunikasi dari Middleton dalam Hafied Cangara yang menekankan keterpaduan antara komunikator, pesan, saluran, dan komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi yang terencana dan terukur dapat memberikan dampak positif dalam upaya penurunan stunting di daerah. (Ariansyah & Mauliansyah, 2023)

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tentang komunikasi kebijakan dan strategi komunikasi dalam penanganan stunting menunjukkan adanya perbedaan seperti perbedaan fokus, konteks, dan teori yang digunakan. Ada penelitian yang menitikberatkan pada strategi komunikasi pemerintah secara umum, ada yang mengkaji peran lintas sektor, efektivitas program tertentu, hingga pendekatan psikologis dalam penerimaan pesan kesehatan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa strategi komunikasi sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, aktor yang terlibat, serta sasaran komunikasi, sehingga hasil dan efektivitasnya pun bervariasi. Hal ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengkaji **“Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024”** dengan menggunakan

teori Edward III yang berfokus pada indikator komunikasi nya dengan mencakup transmisi, kejelasan dan konsistensi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan komunikasi percepatan penurunan stunting?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses komunikasi tentang percepatan penurunan stunting.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah ditetapkan sebagai acuan untuk memastikan fokus penelitian agar tetap terarah dan tidak meluas diluar konteks yang telah ditentukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dibatasi pada komunikasi yang dilaksanakan terkait kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021-2024.

2. Subjek penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A), Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Fokus penelitian ini diarahkan pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam komunikasi kebijakan percepatan penurunan stunting.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini maka manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.5.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik, khususnya dalam memahami bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan dari regulasi pemerintah seperti Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah teoritis mengenai isu kesehatan terhadap perkembangan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan kontribusi pada teori komunikasi kebijakan dengan mengeksplorasi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses percepatan penurunan stunting.

1.5.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya pihak yang terlibat dalam komunikasi kebijakan dari Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023. Melalui analisis yang dilakukan, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan tersebut agar lebih efektif dalam mempercepat penurunan stunting.
2. Komunikasi dalam implementasi kebijakan berguna untuk menyatukan visi dan strategi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan pihak lainnya. Sehingga dengan penyampaian informasi kebijakan yang terbuka dan terstruktur, koordinasi antar lembaga akan lebih efektif khususnya dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif terhadap stunting.
3. Penelitian ini juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan peran keluarga dalam mencegah stunting, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penurunan stunting di daerah masing-masing.